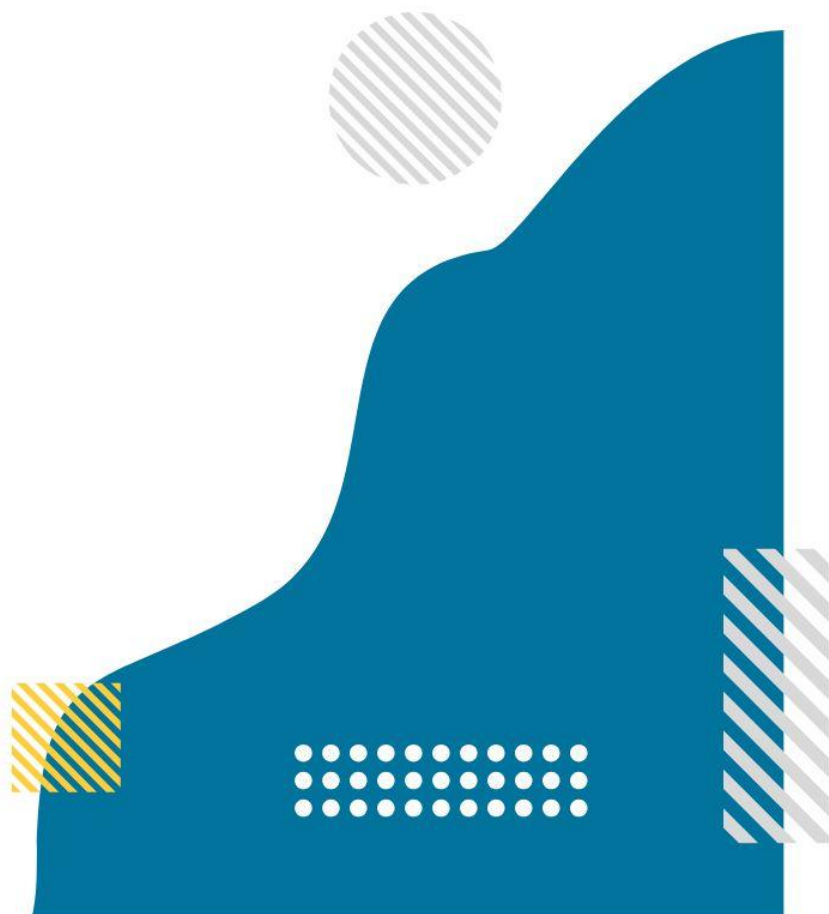
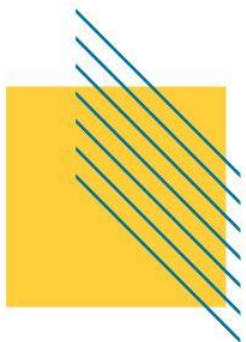




LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Foruk Konsultasi Publik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dapat terlaksana sebagaimana di amanahkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan Permentan Nomor 16 Tahun 2017 diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku penerima layanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Dengan terlaksananya Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan pelayanan publik.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, semoga bermanfaat khususnya dalam Pelayanan Publik.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Tapin



Ryza Ramadie, SE

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19740315 200003 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan Pelaksanaan FKP	2
3. Ruang Lingkup.....	2

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	4
3. Metode Pelaksanaan FKP.....	5
4. Sumber Input dan Tema FKP.....	6

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Analisis.....	8
3. Rencana Aksi.....	10

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Tapin.

2. Tujuan

FKP dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pelayanan yang telah dilaksanakan oleh DKP, diharapkan dapat masukan untuk perbaikan pelayanan dari para pengguna layanan (masyarakat) dan skpd terkait, sehingga jika dipandang perlu dapat melakukan perbaikan / revisi terhadap standar operasional pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan. sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan (Dinas Ketahanan Pangan), sehingga dapat meminimalisir kebijakan yang merugikan publik/pengguna layanan.

Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diterapkan, memperoleh kepastian pelayanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara dan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, bahwa ada 6 pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh DKP Kabupaten Tapin, yaitu : Pelayanan Ketersediaan Pangan (NBM, GPM), Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan (SKPG, PPH), Pelayanan Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Pelayanan Dasar Cadangan Pangan Pemerintah.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin, pada Hari Kamis Tanggal 07 Agustus 2025 bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan dimulai jam 08.30 wita sampai selesai.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara kegiatan FKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, dipimpin oleh Kepala Dinas, bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang dan semua karyawan DKP. Peserta/undangan terdiri para Camat se Kabupaten Tapin, penerima manfaat pelayanan dan media masa (Tapin TV).

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode pelaksanaan dilaksanakan dengan paparan expose pelaksanaan beberapa kegiatan dari masing-masing bidang. Kepala Dinas memberikan arahan tentang pentingnya melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan (SP) dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik dan tepat sasaran. Setelah paparan/expose dari para kabid tentang pelayanan yang menjadi tugasnya dilanjutkan sesi tanya jawab dengan moderator sekretaris dinas.

4. Sumber Input dan Tema FKP

a. Sumber Input

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik, Unsur Masyarakat/Tokoh Masyarakat Penerima Manfaat dan Kecamatan serta media masa (Tapin TV).

b. Tema FKP

Forum Konsultasi Publik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin "UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGA KABUPATEN TAPIN".

c. Susunan Acara

FKP dilaksanakan untuk evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin periode Januari – Awal Agustus 2025. Dengan susunan acara sebagai berikut :

No	Waktu (WITA)	Acara	Petugas/Penanggung Jawab
1.	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2.	09.00 – 09.15	Pembukaan dan arahan	Kepala Dinas
3.	09.15 - 10.30	Paparan Materi - Gerakan Pangan Murah - Bantuan Pangan untuk masyarakat Miskin	Para Kepala Bidang
4.	10.30 – 11.15	Diskusi	Seluruh Peserta
5.	11.15 – 11.30	Kesimpulan	Sekretaris
6.	11.30 – 12.00	Penutup/Doa	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam kegiatan FKP ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilaksanakan periode Januari - Juli 2025, terdapat 6 pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh DKP Kabupaten Tapin, yaitu : Pelayanan Ketersediaan Pangan (NBM, GPM), Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan (SKPG, PPH), Pelayanan Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Pelayanan Dasar Cadangan Pangan Pemerintah. Masing-masing terdapat 9 unsur pelayanan yang dinilai. Meliputi : 1). Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi; 2). Sistem, mekanisme dan prosedur, 3). Waktu penyelesaian, 4). Biaya/ tarif, 5). Produk spesifikasi jenis pelayanan, 6). Kompetensi pelaksana, 7). Perilaku pelaksana, 8). Penanganan pengaduan, saran dan masukan, 9). Sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

- a. Biaya / tarif pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,09. Hal ini dikarenakan kegiatan ini adalah menjual sembako bersubsidi. Dimana paket sembako yang seharusnya harga pasar Rp 188.000 hanya dibayar Rp 103.000,- artinya mendapat subsidi Rp 85.000 per paket.
- b. Waktu penyelesaian layanan yang mendapatkan nilai 3,13 adalah nilai terendah kedua. Dikarenakan pengguna layanan datang pada waktu yang hampir bersamaan, sehingga diperlukan antrian
- c. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tentang penanganan pengaduan pengguna layanan mendapatkan nilai tertinggi 3,69 dari unsur layanan, tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam layanan mendapatkan nilai 3,47 dan tentang perilaku petugas dalam pelayanan mendapat nilai 3,38.

Hasil SKM terhadap pelayanan Gerakan Pangan Murah diperoleh nilai rata-rata baik terhadap 9 unsur diatas. Total nilai IKM Unit layanan 82,90 (sangat Baik / A).

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh pengguna layanan. Adapun masukan, aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh publik sebagai berikut :

- ✓ GPM sangat diminati karena bahan pangan yg dijual mendapat subsidi pemerintah, namun berbeda dengan harga beras umum di pasaran. Harga Eceran Tertinggi sebetulnya telah ditetapkan oleh pemerintah, namun di lapangan dijumpai harga yang berbeda-beda di setiap tempat membuat ketidakjelasan atau tidak dipahami setiap pelaku usaha untuk menetapkan harga sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan.

- ✓ SOP tentang Gerakan Pangan Murah sudah cukup baik, namun diusulkan jumlah paket bahan pangan yang dijual lebih banyak dan item bahan pangan yang dijual lebih beragam.
- ✓ Perlu adanya sosialisasi dari instansi berwenang untuk memberikan pemahaman ke masyarakat/konsumen tentang pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat terkait penetapan standarisasi residu bahan pangan yang beredar dipasar yang aman dikonsumsi oleh masyarakat.
- ✓ Perlu adanya bantuan promosi bagi masyarakat petani/pedagang dalam pemasaran karena dirasakan kesulitannya membawa produk lokal keluar daerah sedangkan produk pangan luar daerah dengan mudah masuk ke pasar lokal

2. Analisis

Analisis permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik :

- a. Perlu adanya koordinasi dengan Satgas Pangan untuk memantau harga bahan pangan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sering dilakukan sidak terhadap ke pasar bersama Tim berwenang untuk memantau harga pangan sesuai ketentuan pemerintah, untuk melindungi konsumen.
- b. GPM sangat membantu masyarakat dalam menekan biaya pengeluaran rumah tangga. Jumlah paket dan jumlah item bahan pangan yang dijual lebih banyak.
- c. Mengenai bahan pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat terkait penetapan standarisasi residu bahan pangan yang beredar dipasar induk yang aman untuk dikonsumsi merupakan hal penting dalam memilih dan memilih bahan pangan yang aman untuk dikonsumsi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait standarisasi yang aman untuk dikonsumsi.
- d. Penguatan kapasitas dan kualitas produk merupakan hal penting dengan cara melakukan standarisasi mutu produk sesuai target pasar luar daerah, pengemasan produk agar tidak rusak selama pengiriman dan melakukan pelatihan packaging.

3. Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan berdasarkan rekomendasi kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan melakukan pemantauan secara bertahap.
- b. Mengusulkan anggaran GPM lebih banyak untuk tahun berikutnya, sehingga jumlah paket dan bahan pangan yg dijual lebih beragam.
- c. Mengadakan sosialisasi terkait standarisasi yang aman untuk dikonsumsi
- d. Melakukan pemantauan secara bertahap terkait bahan pangan produk lokal.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Hasil dari Forum Konsultasi Publik (FKP) diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan dalam penyusunan standar operasional pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik (FKP) dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tapin



Ryza Ramadie, SE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740315 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jl. Sudirman No.88 Telp.(0517) 31790 Kode Pos 71111
RANTAU

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

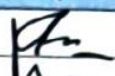
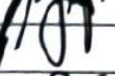
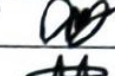
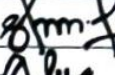
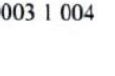
Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilaksanakan Forum Komunikasi Publik oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin, Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4
1	Harga eceran tertinggi yang berbeda-beda di setiap tempat membuat ketidakjelasan atau tidak dipahami setiap pelaku usaha Untuk menetapkan harga sehingga kesulitan dalam mengimplementasi	melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan melakukan pemantauan secara bertahap	1 bulan
2	Mengenai pangan segar yang di konsumsi oleh masyarakat, ketepatan standarisasi residu bahan pangan yang beredar di pasar induk yang boleh atau aman di konsumsi masyarakat	melakukan sosialisasi terkait standarisasi Residu yang aman Untuk dikonsumsi	1 bulan
3	Kesusahan dalam membawa produk lokal keluar daerah sedangkan produk pangan luar dengan mudah masuk ke pasar lokal	melakukan pemantauan secara bertahap	1 bulan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan komitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengguna layanan yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi proses tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya :

NO	NAMA	PERWAKILAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Poulon Budiarto	Diskam Tapin	
2	Dailun	Disperin	
3	M. Bahyudani	DLH	
4	Hj. Aminah	Kec. Binuang	
5	IRMA DAILUN	Kec. Pangraen	
6	M. NUROIN	DISPERIN	
7	A. Maulidi	Disdag	
8	Erlita Ayu Egawati	Kec. Tapin Utara	
9	Rohani	KWT Bungur	
10	Sutra Ani	Kader PKK Kec.	
11	Noorsaleha E-H	Penerima GPM	
12	Ece Hariani	Kec. Hekmon	
13	Heldayanti	Kec. Batarayan	
14	Mahalli	Kec. CLS.	
15	PONINSYAH	Shaban	

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ryza Ramadie, SE
NIP.19740315 200003 1 004

Sekretaris,

Ir. Aji Budiono, M.MA
NIP.19680121 200003 1 004

DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK

Hari / Tanggal : Kamis, 07 Agustus 2025

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	Ryza Fandi	KorS DKP	RTU	
2	Ryza Fandi	Sekretaris	DKP	
3	Nadia Maudyana I	Tapin TV	Bitahan	
4	Raulen Budianto	IF Alimudatun	Dislekan Tapi	
5	Ecc Heriani	Kec. Ekonomi	Kec. Hatnren	
6	Hg. Amarah	Kec. Ekonomi	Kec. Binuene	
7	FIRRIANSYAH	Pj. KPD. KKP	Pantau	
8	Darlan	Antis. KKP	Pantau	
9	Rina	Kaur Umum & TU	Ds Lumbi Rayu	
10	Mahalli	Plt. Kasir Kesta	CLS.	
11	Erlita Ayu G.	PTT	Taput	
12	Shanma Maruya Nabaria	PKK	Tapue	
13	Halimaturrahman	Tapin TV	Timbung	
14	Ryan Fadilah	Tapin TV	Rantau	
15	SPI WATUMI	AKP	PANTAU	
16	ROHANI	PKK	BUNGUR	
17	SUTRA AHI	PKK	BUNGUR	
18	Rahmah	Faktor PKK	Jengoh Baranis	
19	A. Maulidi	IF. Analisis Perda	Asda	
20	M. Rahmadani	—	PL. Berantas Raya	
21	RONIANSYAH	—	Shaban	
22	Jurnal APRIN 2	PKK	DISDA	
23	Noorsaleha E.H	—	As. Banderang	
24	Ambar Kirana	—	Ds Dulang	
25	Moch. Nurman	DUP DUP	Reman	
26	Ratniani Zaidah	Analisis psm	DKP	
27	Hasibetun Aisa	PTT	Kec. Bkr	
28	Heldayanti	Staf	" - "	

30	Zainal Ilmi	Tapin TV	Pantau	
31	IRMA DAHLAN	KASI KESRA	BUNGUR	
32	M MUR DIN	JF	BERIKIN	
33	ALBERT HOSEA	JF	"	
34	Alifah Mor'an	PTT	DKP	
35	Ardi Lowardi	Staf	DKP	
36	M. Jua	Infoc	DKP	
37	Syarban	PTT	DKP	
38	Agni	PTT	DKP	
39	Ryana	PTT	DKP	
40	Miftahul Faridh	AKP	DKP	
41	Siti Raudatul J	AKP	DKP	
42	Aria Rahmadi	Staf	DKP	
43	S. Ahsanul M.	Infoc FOP	DKP	
44	Syaparjo	Pelaksana	DKP	
45	Ashlin Nurrianiati	Analisis pangan	DKP	
46	Muhammad Fathur	Staf	DKP	
47	Slamat Rayas	Umpeg	R-TV	
48	Gajali Rahman	Staf	DKP	
49	Rizka Ariani	Staf	Trantang	
50	Eka Arum S	DKP	DKP	
51	Risma Asyati	Staf	DKP	
52	M. Ariadi	Staf DKP	Panor	
53	Laela P	PTT	Pantau	
54	ARIF M. M	PTT	Pantau	
55	Muhammad Amin	PTT	"	
56				

Pembuat Daftar,

Eka Arum Sukmawati, A.Md.Kom.

LAMPIRAN III Surat Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Telpon (0517) 31790 Kode Pos 71111

RANTAU

Rantau, 5 Agustus 2025

Nomor : 500.1.3.1/215 /DKP/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Kepada
Yth. Daftar terlampir

Sehubungan akan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin, dengan ini Saudarafi diundang
untuk menghadiri kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Agustus 2025

Pukul : 09.00 Wita - selesai

Tempat : Aula Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapin

Jl. Jenderal Sudirman No 88 Rantau,

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami
ucapkan terima kasih

Kepala Dinas,



RYZA RAMADIE, SE
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19740315 200003 1 004

Lampiran Surat No : 500.1.3.1/ 215 /DKP/2025
Tanggal : 5 Agustus 2025

Daftar Lampiran :

1. Dinas Pertanian
2. Dinas Perdagangan
3. Dinas Perindustrian
4. Dinas Perikanan
5. Kecamatan Tapin Utara
6. Kecamatan Bungur
7. Kecamatan Lokpaikat
8. Kecamatan Bakarangan
9. Kecamatan Candi Laras Selatan
10. Kecamatan Binuang
11. Kecamatan Hatungun
12. Penerima Manfaat Gerakan Pangan Murah
13. Kelompok Wanita Tani
14. Kader Tim Penggerak PKK Kecamatan
15. Petugas Pemeliharaan RTH (2 orang)

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

